

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan bersifat deliberatif dalam arti masyarakat mentransmisikan dan mengabadikan gagasan kehidupan yang baik yang berasal dari kepercayaan masyarakat yang fundamental mengenai hakikat dunia, pengetahuan dan tata nilai. Pendidikan menggerakkan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Pendidikan juga mampu memberikan makna pada manusia yang membuat manusia mampu mendapatkan sebuah gagasan kehidupan. Gagasan kehidupan yang diperoleh manusia tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat yang bersifat mendasar seperti norma, pengetahuan, dan hakikat dari kehidupan itu sendiri (Alwasilah, 2009).

Pendidikan merupakan sebuah upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa kearah kedewasaan (Langeveld, 1980). Apa yang dikatakan oleh Langeveld menunjukkan bahwa pendidikan amat penting. Pendidikan berperan sebagai proses pendewasaan pada seseorang. Dalam hal ini, dewasa yang dimaksud adalah dewasa berpikir dan bertindak. Manusia akan menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak manakala telah mendapat dan mengenyam pendidikan dengan baik. Dalam proses pendidikan, kita dibiasakan untuk memecahkan sebuah persoalan dengan menggunakan media soal yang diberikan oleh guru. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kedewasaan dalam berfikir, yang mana tujuannya adalah manusia dewasa secara menyeluruh.

Proses menuju dewasa yang terjadi pada diri manusia berjalan secara bertahap sesuai dengan tingkatan usia. Pada usia 11 sampai 15 tahun secara perkembangan kognitif peserta didik telah memasuki tahap perkembangan moral formal (Piaget, 1960). Artinya bahwa anak sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Tahap usia 11 sampai dengan 15 tahun disebut sebagai tahap operasional formal. Maksudnya adalah seorang anak harus sudah mampu berfikir secara logis (masuk akal) terhadap apa yang dilihatnya. Ada sebuah peristiwa dimana teori tersebut tidak sejalan dengan kenyataan. Anak seolah

**Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2018**

*KAJIAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEISLAMAN TERHADAP PERILAKU TOLERANSI SISWA DI  
MADRASAH ALIYAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berfikir bebas tidak sejalan sehingga berdampak pada sikap yang intoleran. Padahal seharusnya pada tahap usia tersebut, seorang anak sudah harus mampu berpikir hipothetico deductive dan inductive dengan kemampuan menarik kesimpulan, dan mengembangkan hipotesa secara logis.

Ketidak sesuaian antara teori dan fakta tersebut terjadi disebuah sekolah berbasis agama tingkat menengah atas (madrasah aliyah). Suatu hari, disekolah tersebut mengadakan sebuah acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Dimana dalam acaranya mengundang seorang da'i yang sedang populer (*hits*) dikalangan anak muda. Dengan gaya khasnya, dai tersebut tampil memberikan *tausyiah* kepada seluruh civitas akademika sekolah tersebut. Hampir sebagian besar siswa mengikuti acara tersebut sampai tuntas hingga selesai acara.

Ketika selesai acara tersebut, penulis mencoba berbaur dengan para siswa untuk sambil bercerita mengenai acara yang baru saja selesai dilaksanakan. Tanpa diduga, ada sebuah ucapan yang terlontar dari salah seorang siswa yang kurang lebih berbunyi "*Pa, eta tadi nu ceramah cenah gaul tapi sholeh, tapi piraku ustad teh ceramah ngan make calana lepis jeung kaos? Berarti teu sholeh atuh pa. Sabab nu sholeh mah kuduna make peci, acuk koko jeung sorban*". (Pak, itu tadi yang memberikan ceramah katanya gaul tapi sholeh, masa ustad ceramah hanya memakai celana jeans dan baju kaus? Berarti itu tidak sholeh, karena yang sholeh itu seharusnya memakai kopiah dan baju muslim dan sorban").

Mendengar hal itu saya kaget dan tidak menyangka siswa berinterpretasi seperti itu. Sekilas seperti hal sepele (*biasa saja*), namun jika dibiarkan dampaknya cukup serius. Apa yang diucapkan siswa dalam obrolan tersebut bisa berpotensi menimbulkan konflik jika dibiarkan begitu saja. Mengingat, pendapat tersebut menunjukkan sikap intoleran terhadap orang lain. Sementara, perbedaan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Jika dibiarkan, maka akan selalu terjadi konflik akibat berbeda pandangan.

Ucapan siswa tersebut, menimbulkan pertanyaan berlanjut dalam diri saya. Islam merupakan agama yang sempurna. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 diartikan bahwa "*Kami tidak mengutus engkau Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam*". Dalam kitab Tafsir Ibnul Qoyyim karya Ibnu

Qayyim Al Jauziyyah ayat tersebut salah satunya ditafsirkan bahwa “Islam adalah rahmat bagi setiap manusia”. Tapi, mengapa dalam diri seorang siswa yang dididik dengan menggunakan metode islami, sikapnya tidak menjadi rahmat bagi sesamanya? Malahan cenderung tendensius mengarah pada sikap intoleran.

Fenomena sikap intoleran yang dilakukan oleh siswa tidak sampai disitu saja. Sewaktu saya menjelaskan materi “Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila” saya mengatakan bahwa “sebagai manusia, kita memiliki kewajiban saling berbuat baik antar sesama, misalnya ketika ada teman kita yang berbeda agama lalu saat Idul Fitri memberikan ucapan selamat idul fitri, maka seyogyanya kita juga membalasnya ketika mereka merayakan hari keagamaannya”. Saat itu ada siswa yang mengangkat tangannya dan memberikan interupsi dan mengatakan bahwa “Pa, itu bertentangan dengan akidah islam!”. Lalu saya jawab “...anak-anak, kita melakukan hal tersebut dalam perspektif sebagai warga negara, yang mana negara ini merupakan negara yang pluralis, sehingga untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama kita boleh melakukan hal itu. Karena mereka semua diakui sebagai sebuah agama di negara kita oleh konstitusi”.

Selain itu, kasus intoleransi sikap juga tidak hanya terjadi pada permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan agama. Ditengah naiknya budaya *eastrenisasi* (budaya ketimur-timuran) yang mana kebanyakan budaya tersebut mengadopsi gaya budaya ketimuran, sikap intoleransi terhadap hal yang tidak seperti pada umumnya kerap kali terjadi. Ketika ada siswi yang sedang *belajar* menggunakan *niqab* atau cadar (penutup wajah bagi muslimah), seringkali siswi tersebut mendapat *bullying* oleh teman-temannya. Contoh perilaku *bullying* itu ketika siswi yang memakai niqab tersebut diteriaki “ninja!”. Sehingga pada ujungnya menimbulkan konflik antar siswa dan siswi. Ini merupakan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan dan mengancam persatuan.

Fenomena intoleransi sikap lainnya yang terjadi di lingkungan sekolah adalah ketika ada seorang siswa yang menggunakan celana diatas mata kaki atau *isbal*. Kerap kali siswa tersebut disindir oleh temannya dengan perkataan “...*diimah maneh banjirnya? Make calanana ngatung jiga sieun baseuh ku cai!*” Ucapan yang terlontar dari siswa tersebut kepada temannya sekilas biasa saja, namun saya

meyakini bahwa jika hal tersebut terus-menerus dibiarkan maka akan terjadi *gap* antar siswa yang akan mengancam kerukunan. Itu merupakan gambaran kasus sikap intoleran yang terjadi dilingkungan pendidikan formal madrasah aliyah. Para siswa dan siswi seolah merasa alergi terhadap sesuatu yang berbeda dengannya. Padahal, dimasyarakat mereka kelak akan mendapati berbagai macam perbedaan yang lebih banyak dibanding saat mereka disekolah. Hal yang ditakutkan adalah mereka kelak yang selalu merasa alergi terhadap sesuatu yang beda tidak akan bisa berbaur dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Berbicara mengenai kasus intoleransi di Indonesia, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Komnas HAM merilis data kasus pelanggaran HAM pada tahun 2016 yang mana didalamnya terdapat kasus intoleransi. Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM, telah menerima berkas pengaduan sebanyak 7.188 berkas. Berdasarkan data pengaduan tersebut, Korporasi (1.030 berkas), Pemerintah Daerah (931 berkas), Pemerintah Pusat/ Kementerian (619 berkas), Lembaga Peradilan (436 berkas), BUMN/BUMD (359 berkas), Kejaksaan (214 berkas), Lembaga Negara (Non Kementerian) (122 berkas), dan Lembaga Pendidikan (108 berkas). Berdasarkan aktor atau insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 981 berkas. Dengan gambaran data pengaduan tersebut, selama beberapa tahun berturut-turut, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan (Komnas HAM, 2016).

Diuraikan dalam setiap tahunnya secara spesifik, dimulai tahun 2016 terdapat sekitar 100 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Kasus yang menjadi sorotan Komnas HAM dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) antara lain adalah Kerusuhan Bernuansa Sara Di Tanjung Balai. Pada 29 Juli 2016 malam terjadi pertemuan dan permintaan keterangan dari Masyarakat Kota Tanjung Balai, Kepolisian Resor Tanjung Balai, Kepolisian

Daerah Sumatera Utara, dan juga melakukan kunjungan lokasi kejadian. Temuan faktanya adalah:

1. Bahwa komunikasi awal yang diduga memicu kerusakan pada dasarnya dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan Agama tertentu.
2. Bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas Umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan Agama di Tanjung Balai.
3. Bahwa aparat intelejen tidak mampu melakukan deteksi dini adanya potensi konflik SARA selama sekitar 1 (satu) minggu sejak terjadinya komunikasi awal tersebut hingga terjadinya peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah dan rumah di Tanjung Balai.

Rilis yang dilakukan oleh Komnas HAM sejalan dengan yang lapran yang diterbitkan oleh Setara Institute tentang kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam laporan Setara, dituliskan bahwa pada tahun 2016 Jawa Barat menjadi provinsi “jawara” dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal tersebut tercantum dalam table berikut:

**Tabel 1. 1.** Sebaran Peristiwa Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Jumlah
Jawa Barat	41
DKI Jakarta	31
Jawa Timur	22
Jawa Tengah	14
Bangka Belitung	11
Sulawesi Selatan	10
Aceh	8
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	7
Jambi	7
DI Yogyakarta	7

**Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2018**

*KAJIAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEISLAMAN TERHADAP PERILAKU TOLERANSI SISWA DI MADRASAH ALIYAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kalimantan Barat	7
Riau	5
Nusa Tenggara Barat	5
Banten	5
Kalimantan Timur	4
Kepulauan Riau	3
Maluku Utara	3
Lampung	3
Kalimantan Tengah	2
Sulawesi Utara	2
Sulawesi Tenggara	1
Papua	1
Sulawesi Tengah	1
Total	208

(Setara Institute, 2016)

Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka actual dan peristiwa pelanggaran KBB di Jawa Barat belum mengalami pergeseran apalagi transformasi signifikan. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya peristiwa KBB di provinsi terbesar di Indonesia dari aspek demografis tersebut, antara lain: Pertama, faktor regulasi diskriminatif. Sebagaimana banyak dipersoalkan oleh masyarakat sipil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah.

Sebelum regeling tersebut dikeluarkan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak untuk bebas beragama terhadap komunitas Ahmadiyah sudah terjadi. Pasca-terbitnya Pergub tersebut dengan sendirinya intensitas persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat semakin berlipat. Pergub telah secara sistemik memancing kelompok-kelompok intoleran yang memang memusuhi dan anti-Ahmadiyah untuk bertindak secara lebih agresif terhadap eksistensi Ahmadiyah. Secara sosiologis, Pergub tersebut nyata-nyata menjadi alat justifikasi bagi kelompok-kelompok intoleran di tengah-tengah masyarakat untuk membenarkan

tindakan-tindakan pelanggaran dan intoleransi yang mereka lakukan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.

Kedua, daya dukung kebijakan intoleran di tingkat kabupaten/ kota di Jawa Barat. Beberapa daerah kabupaten atau kota di Jawa Barat seringkali suportif terhadap eskalasi intoleransi, misalnya kebijakan pelarangan peringatan Asyura' bagi komunitas Syi'ah seperti yang pernah dikeluarkan oleh Walikota Bogor. Bahkan dalam riset indexing yang dilakukan oleh SETARA Institute menunjukkan bahwa 10 kota yang tingkat toleransinya paling tidak baik sebagian besar di antaranya berasal dari provinsi Jawa Barat. Tujuh dari 10 peringkat teratas adalah Kota Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Ketiga, menjamurnya kelompok-kelompok intoleran. Di Jawa Barat terdapat kelompok-kelompok yang kerap melakukan tindakan- tindakan pelanggaran dan intoleransi, terutama di daerah-daerah kabupaten/kota seperti Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, dan lainnya.

Keempat, lemahnya kapasitas institusi pemerintah dan institusi sosial dalam pengelolaan dinamika masyarakat dengan jumlah sangat besar dan kompleksitas tinggi. Sebagaimana diketahui, Jawa Barat secara demografis merupakan daerah yang paling besar di Indonesia. Dengan demikian, keberagaman di Jawa Barat lebih kompleks dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dengan demikian factor yang mempengaruhi tingginya intoleransi sesungguhnya bukan jumlah penduduk yang besar itu dan dengan demikian tingkat keberagaman yang tinggi, melainkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola besarnya jumlah penduduk dan tingginya keberagaman di sana.

Faktor kelima, rendahnya kesadaran keberagaman (pluralitas dan multikulturalitas) politisi-politisi Partai Islam di sana. Kuatnya sentimen keagamaan mayoritas di Jawa Barat bertemu dengan besarnya agenda office-seeking politisi di ranah Pasundan, sehingga mereka memilih untuk tunduk pada atau paling tidak mengkapitalisasi kehendak mayoritas.

Isu-isu agama pun dimanfaatkan untuk menghimpun suara pemilih (vote getting) dari kalangan mayoritas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal ini dengan sendirinya berpotensi mendiskreditkan kelompok-kelompok

minoritas lebih dalam, tidak saja secara sosial, namun pada akhirnya juga secara politis sebagai implikasi dari janji-janji mereka kepada dan pada tingkatan tertentu konsensus dengan kelompok mayoritas Islam.

Disisi lain praktik intoleransi dalam lingkup dunia pendidikan juga banyak terjadi. Hasil survei terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan pengaruh intoleransi dan radikalisme menjalar ke banyak sekolah dan universitas di Indonesia. Menurut survei ini, terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam (PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Survei ini juga menunjukkan sebanyak 48,95 persen responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Hal tersebut diperparah dengan, 58,5 persen responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan pada opini yang radikal. Survei menyimpulkan pengaruh intoleransi dan radikalisme di kalangan generasi Z Indonesia, yakni mereka yang lahir setelah 1995, dapat dikatakan dalam kondisi seperti “api dalam sekam”. Di satu sisi, memang belum menyala, itu betul, tapi ada potensi untuk menjadi api.

Hal lainnya yang menarik dalam survey ini adalah tidak hanya siswa yang memiliki potensi menjadi intoleran, survei ini pun menyimpulkan guru dan dosen juga memiliki potensi menjadi intoleran. Menurut survei ini, setidaknya 64,66 persen guru dan dosen menjadikan Ahmadiyah di urutan pertama sebagai aliran Islam yang tidak disukai. Diikuti Syiah di posisi kedua dengan 55,6 persen. Selain itu, 44,72 persen guru dan dosen juga tidak setuju dengan desakan agar pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah.

Melihat data hasil survey yang telah dilakukan, bisa dikatakan bahwa intoleransi di Indonesia adalah bahaya laten. Tak ubahnya seperti praktik korupsi yang bisa merenggut asset generasi. Intoleransi yang berujung pada perpecahan bangsa, akan menjadi sebuah kerugian bagi negara yang masih berkembang seperti

Indonesia. Akan banyak sekali hal yang tidak bisa termanfaatkan potensinya ketika intoleransi dibiarkan tanpa adanya penyelesaian. Mengingat potensi perpecahan generasi sangat mungkin terjadi.

Dalam menyelesaikan kasus intoleransi di Indonesia, khususnya dalam lingkup dunia pendidikan, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kekosongan ideologi kebangsaan di dalam lingkungan sekolah dan tidak efektifnya pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus intoleransi di lingkungan pendidikan. Hal tersebut sebagaimana yang diperlihatkan pada hasil riset yang dilakukan Ma'arif Institute terkait institusi sekolah menemukan belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara spesifik menguatkan kebhinekaan Kurikulum pendidikan kebangsaan, terutama Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah selama ini memang belum optimal. Padahal, pelajaran Pancasila dan PKN sangat penting sebagai fondasi moral berbangsa dan bernegara, bersama dengan pelajaran agama dan Bahasa Indonesia (Maarif Institute, 2017).

PKN sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan harus mendapat perhatian lebih. Termasuk pembenahan kurikulum dan kompetensi guru. Karena membangun manusia melalui pendidikan adalah sebuah keharusan. Tentu fondasi utama pendidikan adalah kurikulum dan kompetensi guru. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman yang saat ini mendapat ujian nyata dengan maraknya tindakan intoleransi dan gerakan anti-Pancasila.

Bibit-bibit sikap intoleransi harus segera dikikis secara perlahan. Agar mereka calon generasi pelurus bangsa mampu bersatu membangun bangsa ini dengan damai dan rukun hingga tercipta harmonisasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi salah satu pilar negara ini adalah “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka bagi bangsa ini perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat penelitian ini kedalam judul **Kajian Transformasi Nilai-Nilai**

## **Keislaman Terhadap Perilaku Toleransi Di Madrasah Aliyah (Suatu Tinjauan Kebajikan Kewarganegaraan)**

### **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Sebagai langkah awal sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan agar arah penelitian dapat tergambar secara jelas. Berkaitan dengan judul penelitian, yakni Sikap Toleransi Siswa Madrasah Dalam Tinjauan Kebajikan Kewarganegaraan maka penulis dapat mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap ajaran agama yang tidak komprehensif dan tepat akan menimbulkan perspektif yang kaku dalam menyikapi setiap fenomena yang berkaitan dengan keyakinan.
2. Berbedanya cara memberikan pemahaman orang tua pada anak terkait masalah menyikapi perbedaan berdampak pada perilaku yang tidak toleran yang dimiliki oleh anak tersebut.
3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dewasa ini dirasa belum mampu menumbuhkan kompetensi warga negara secara utuh. Sehingga siswa kurang dapat memaknai serta merefleksikan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan serta untuk memperoleh temuan dari sebuah persoalan yang diangkat dalam penelitian, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran transformasi nilai-nilai keislaman di madrasah aliyah?
2. Bagaimana gambaran perilaku toleransi di madrasah aliyah?
3. Bagaimana relasi antara pemahaman keislaman dengan perilaku toleransi?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran transformasi nilai-nilai keislaman di madrasah.

2. Untuk mengetahui gambaran perilaku toleransi di madrasah.
3. Untuk mengetahui relasi antara pemahaman nilai-nilai keislaman dengan perilaku toleransi.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsiah dalam bentuk teoritis empiris tentang sikap toleransi sebagai kebajikan kewarganegaraan. Serta memberikan sebuah pencerahan bahwa nilai-nilai toleransi harus tetap dipupuk hingga tertanam dalam hati sanubari bangsa Indonesia sebagai kebajikan warga negara.

### **1.5.2. Secara Praksis**

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praksis bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam membentuk sikap toleran siswa sebagai kebajikan kewarganegaraan. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kontekstual, di mana siswa dapat melakukan analisis, refleksi, dan pemaknaan terhadap nilai-nilai toleransi ke dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di lingkungan masyarakat dalam rangka membentuk warganegara yang toleran yakni dengan menanamkan nilai-nilai toleran sebagai kebajikan warga negara dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan.

## **1.6. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X), yaitu transformasi nilai keislaman
2. Variabel dependen (Y), yaitu perilaku toleransi di madrasah

## 1.7. Definisi Operasional

### 1.7.1. Nilai Keislaman (*Islamic Values*)

Nilai (*values*) adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nilai merupakan sebuah landasan atau alat untuk memandu manusia dalam memilih sebuah keputusan. Lebih lanjut Spranger menyatakan tentang klasifikasi nilai, salah satunya adalah nilai agama. Nilai agama merupakan salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama. (Spranger, 1984)

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam (Arab: al-islām, الإسلام, "berserah diri kepada Tuhan") adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar "selamat" (Salama). Dari pengertian Islam secara bahasa ini, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat (alam kehidupan setelah kematian) (Al-Quran Tafsir Jalalain & Tafsir Ibnu Katsir).

### 1.7.2. Perilaku Toleransi

Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain: menghargai pendapat dan/atau pemikiran orang lain yang

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2018

KAJIAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEISLAMAN TERHADAP PERILAKU TOLERANSI SISWA DI  
MADRASAH ALIYAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berbeda dengan kita serta saling tolong-menolong untuk kemanusiaan tanpa memandang suku/ras/agama/kepercayaannya.